

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA

Meilani Nur Maghfiroh¹, Dimas Septa Andika², Laura Tyas Pratiwi³,
Intan Nur Marcela⁴, Awayna Faza Afifah⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta
a5120510200079@student.ums.ac.id¹, a510200110@student.ums.ac.id²,
a510200112@student.ums.ac.id³, a510200118@student.ums.ac.id⁴, a510200281@student.ums.ac.id⁵

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 31-Agustus-2022

Disetujui: 30-September-2022

Kata Kunci:

Pendidikan inklusi
Masalah ABK

ABSTRAK

Abstrak: Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan pendidikan yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tidak memadai dan setara. Karena penyediaan sekolah luar biasa hanya ada di kota-kota besar. Pendidikan inklusi datang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah sosial Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Tujuan pembentukan pendidikan inklusif adalah meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Selain itu Pendidikan inklusif juga memiliki beberapa permasalahan yang dikarenakan baik sekolah, masyarakat dan guru belum sepenuhnya memahami dan mengetahui bagaimana cara bagaimana pelaksanaan sekolah inklusi yang sesuai dengan aturan yang ada. Pada artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui lebih dalam masalah-masalah apa saja yang dihadapi sekolah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, Hasil artikel ini menyatakan bahwa Pendidikan inklusi sangat positif namun terdapat beberapa permasalahan yang belum diketahui oleh guru, siswa, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

Abstract: Children with special needs have the same rights as children in general to get an education. Unfortunately, the availability of adequate education for children with special needs is not adequate and equal. Because the provision of special schools only in big cities. Inclusive education comes as an alternative solution to overcome the social problems of Children with Special Needs (ABK). The purpose of establishing inclusive education is to minimize the impact caused by an exclusive attitude. In addition, inclusive education also has several problems because both schools, communities and teachers do not fully understand and know how to implement inclusive schools in accordance with existing rules. In this article using descriptive research methods to find out more deeply what problems are faced by schools, especially related to the implementation of inclusive education. society, and government.



This is an open access article under the **BY-NC-ND** license

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusi merupakan salah satu contoh dari layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Program inklusi telah diterapkan di beberapa sekolah umum di Indonesia namun tak jarang dalam prosesnya masih terdapat ketimpangan. Ketimpangan itulah yang menjadikan pendidikan inklusi di Indonesia menjadi sangat terpuruk dan juga kurang diminati oleh masyarakat. Menurut *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*, pendidikan inklusif berarti sekolah harus menunjang semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, emotional, linguistik, sosial atau kondisi yang lainnya. Hal ini termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas serta anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain.

Berdasarkan pada definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan program yang terstruktur mengikuti kelebihan dan kemampuan yang dimiliki anak serta menjunjung tinggi toleransi. Akan tetapi, penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dari definisi tersebut masih terbilang kurang. Dimulai dari faktor pendidikannya, kurikulumnya, fasilitasnya, hingga anak berkebutuhan khususnya yang masih sulit menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Sekolah inklusi di Indonesia, khususnya di Jakarta tergolong masih sangat sedikit dan sekolah-sekolah umum yang telah menerapkan program inklusi masih belum matang atau siap dalam menjalankan program tersebut. Ketidak siapan tersebut berupa kekurangan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang benar-benar menempuh jenjang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Sekolah umum yang belum siap tersebut masih menjadikan guru yang bukan lulusan PLB sebagai guru pembimbing khusus. Dampaknya, banyak guru yang tidak mengerti cara

menangani dengan baik dalam bidang emosi atau kognitif anak berkebutuhan khusus yang kambuh atau kumat.

Pendidikan inklusi di negara-negara Eropa dan Indonesia memiliki perbedaan yang mencolok. Penyelenggaraan program inklusi di sekolah-sekolah umum Eropa memiliki persiapan yang sudah sangat matang. Sebelum mulai melaksanakan program, mereka sudah terlebih dahulu melakukan intervensi dini sehingga pendidikan inklusi di Eropa lebih maju daripada di Indonesia. Pendidikan inklusi di Indonesia masih terbilang rendah. Dimana kurangnya persiapan dalam melaksanakan pendidikan Inklusi sehingga bisa dibilang masih jauh dari harapan masyarakat. Rendahnya mentalitas pendidikan inklusi karena terdapat pandangan orang tua yang merasa ragu untuk memasukkan anaknya ke sekolah inklusi karena menganggap sekolah tersebut berisi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, sekolah inklusi di Indonesia masih kurang dan jumlah guru pembimbing khususnya masih kurang sehingga menambah anggapan negatif orangtua terhadap sekolah inklusi bahwa guru-guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus seandainya sendiri dan tanpa mengikuti program atau kurikulum yang ada. Hal tersebut menyebabkan anak merasa kurang nyaman saat proses belajarnya dan mengakibatkan sekolah inklusi kurang diminati masyarakat.

Alasan lain yang melatarbelakangi rendahnya pendidikan inklusi di Indonesia adalah banyak peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus bersekolah di dekat tempat tinggal mereka. Karena tidak semua sekolah inklusi dapat menerima anak berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya guru pembimbing khusus. Sarana dan prasarana ikut menjadi salah satu faktor rendahnya pendidikan inklusi di Indonesia. Tentunya, dibutuhkan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia, misalnya dengan memperbanyak guru pembimbing khusus yang berasal dari lulusan PLB dan menunjang sarana prasarana demi keberlangsungan proses pembelajaran. Sehingga terdapat ruang positif bagi orang tua agar mau menyekolahkan anak mereka di sekolah inklusi. Keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusi dipengaruhi oleh keberhasilan dari beberapa komponen dan pihak yang terlibat (Giangreco, 2013).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam masalah-masalah apa saja yang dihadapi sekolah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, sebagai upaya untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam yang diperoleh dari persepsi guru yang berkaitan dengan kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh sekolah maupun guru dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Harapannya kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut dapat dipetakan sesuai karakteristiknya sehingga ke depan dapat diberikan intervensi yang sesuai.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) bahwa: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu serta studi literatur. Studi literatur yang digunakan, yaitu dengan mengumpulkan daftar pustaka yang relevan, membaca, serta mengolah data yang ditemukan.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono dalam (Muhsam et al., 2021) triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Setelah itu data dianalisis melalui empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap Individu harus memperoleh pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, inetelektual dan social berhak memperoleh pendidikan khusus. Tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak yang lainnya. Setiap manusia adalah sama, mempunyai hak dan kesempatan yang sama baik untuk berkembang serta meningkatkan pendidikannya. Hal tersebut tentu tidak melihat perbedaan warna kulit, ras, agama maupun yang lainnya karena dalam pendidikan semua sejajar.

Di Indonesia tingkat jumlah anak berkebutuhan khusus semakin meningkat besar setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2005 ditaksir ada kurang lebih 4,2 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia sedangkan dalam data BPS tahun 2007 jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia menjadi 8,3 juta. Dari data BPS tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Dan sebagian besar dari anak berkebutuhan khusus belum mengenyam pendidikan. Sekolah inklusi tidak membatasi hanya untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus saja, melainkan anak yang mengidap HIV/AIDS, anak jalanan, anak yang tidak mampu, bisa mengenyam pendidikan di sekolah inklusi.

Pemerintah Indonesia sudah menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun jumlah sekolah luar biasa tersebut tidak dapat menampung semua anak berkebutuhan khusus karena jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Implementasi UU no 20 tahun 2003 telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk memfasilitasi dan memberikan hak kepada anak berkebutuhan khusus. Pemerintah melakukan percobaan yaitu mendirikan sebuah sekolah inklusi di daerah Istimewa Yogyakarta dan Ibu Kota Jakarta pada tahun 2001.

Pemerintah Indonesia mendeklarasikan secara resmi program “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” di kota Bandung pada tahun 2004. Untuk membangun masyarakat yang inklusif memerangi diskriminasi, menciptakan masyarakat terbuka dan mencapai pendidikan untuk semua maka terciptalah solusi sekolah reguler dengan orientasi inklusif. Sekolah inklusi dapat menekan biaya dan keseluruhan sistem pendidikan kepada mayoritas peserta didik sehingga sekolah inklusi dapat meningkatkan efisiensi, akan tetapi masih banyak ditemukan kesulitan di beberapa kota seperti, tenaga kerja yang memiliki kapabilitas dalam mengajar anak berkebutuhan khusus masih kurang memahami tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan metode untuk menanganinya, minimnya guru pendamping kelas, manajemen sekolah inklusi belum maksimal, masih banyak siswa di dalam kelas, ketidak siapan sekolah menampung anak berkebutuhan khusus, masih adanya intimidasi anak berkebutuhan khusus oleh teman sekelasnya. Secara konseptual akademik inklusi diartikan dengan integrasi menyeluruh untuk siswa tanpa terkecuali siswa dengan kebutuhan khusus dalam kelas regular yang disesuaikan dengan umur siswa dan letak sekolah. Pendidikan inklusi adalah sistem pengajaran yang menggabungkan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dan menggabungkan separuh atauseluruh waktu belajar siswa berkebutuhan khusus dalam kelas regular, dimana lingkungan sekolah memberi kebebasan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus .

Di Indonesia, inklusi memberi kesempatan kepada anak berkelainan dan anak yang lainnya yang selama ini tidak bisa sekolah karena berbagai hal yang menghambat mereka untuk mendapatkan kesempatan sekolah, seperti letak sekolah luar biasa yang jauh, harus bekerja membantu orangtua, dan sebab lainya seperti berada di daerah konflik atau terkena bencana alam (Sugiarmid dalam Smith (2012)). Sekolah inklusi memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mengoptimalkan potensinya serta memenuhi kebutuhan belajarnya dengan program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang mengakomodasi semua siswa di kelas yang sama sesuai dengan usianya dan perkembangannya. Pendidikan inklusi juga membuktikan bahwa mendidik anak dengan kebutuhan khusus bersama dengan anak normal menunjukkan perkembangan yang signifikan (Sadioglu, Batu, Bilgin, dan Oksal, 2013). Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah inklusi perlu adanya integrasi antara seluruh pihak yaitu dari pihak sekolah seperti manajemen sekolah (kurikulum, sarana prasarana yang mendukung), guru, siswa, orangtua, masyarakat dan pemerintah, sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan sekolah inklusi tentunya tidak luput dari berbagai macam permasalahan. Tidak hanya terkait dengan kesiapan guru namun juga siswa, orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah serta kurangnya sarana prasarana tetapi juga minimnya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, guru menjadi salah satu faktor utama dalam proses pendidikan inklusi. Tetapi jika tidak ada bantuan dari pihak-pihak lain tentunya pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan maksimal, sehingga tidak hanya guru yang ditangani tetapi perlu menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik di dalam sekolah ataupun komunitas di luar sekolah tersebut. Tentunya campur tangan pemerintah turut menentukan pelaksanaan sekolah inklusi tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain, baik dari permasalahan guru, siswa, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Pertama, dalam permasalahan guru, guru merasa bahwa kurang memiliki kemampuan dalam menangani ABK. Hal ini disebabkan karena guru kurang memahami tentang ABK dan sekolah inklusi sehingga berdampak pada masalah selanjutnya yaitu menjadi kesulitan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Selain itu, latar belakang guru yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu dari lulusan pendidikan luar biasa menjadikan beban kerja yang berat bagi guru itu sendiri. Sekolah reguler memiliki guru pembimbing khusus yang ditunjuk langsung oleh sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus. Sehingga guru pembimbing khusus biasanya merupakan guru mata pelajaran dan guru kelas yang notabnya bukanlah lulusan Pendidikan Luar Biasa, melainkan lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Matematika, Pendidikan Olahraga, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Sains. Kurangnya guru pendamping kelas yang mumpuni juga menjadi salah satu permasalahan yang ada. Hal tersebut secara tidak langsung memberi dampak pada pemberian penanganan pada siswa ABK yang kurang maksimal, ditambah dengan perbedaan kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda serta jumlah ABK yang melebihi kuota dalam tiap kelasnya sehingga berdampak pada kurang lancarnya proses KBM.

Beban guru semakin berat, pada saat menerima kenyataan dilapangan bahwa banyak dari orangtua ABK tidak

peduli terhadap perkembangan anak nya. Banyak orangtua yang kemudian hanya pasrah sepenuhnya tentang perkembangan anak nya kepada sekolah. Hal ini juga bisa disebabkan karena pemahaman orangtua tentang ABK masih kurang. Permasalahan lain yang muncul yaitu toleransi atau pengertian dari orangtua siswa regular terhadap kebutuhan ABK masih kurang karena banyak dari masyarakat yang masih memandang rendah ABK dan sekolah inklusi sehingga masyarakat kurang memberi dukungan terkait pelaksanaan sekolah inklusi. Hal ini bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat yang terkait pendidikan inklusi dan ABK. Hal tersebut membuat beban guru dan sekolah semakin berat, dimana secara umum, sekolah sendiri belum siap baik dari segi administrasi maupun SDM dalam pelaksanaan pendidikan inklusi disekolahnya, ditambah dengan kurangnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, kurangnya sarana prasarana yang disediakan pemerintah terkait pelaksanaan sekolah inklusi sehingga pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan maksimal. Permasalahan-permasalahan yang muncul sebenarnya dikarenakan baik sekolah, masyarakat dan guru belum sepenuhnya memahami dan mengetahui bagaimana cara menangani ABK pada khususnya. Sekolah dan guru juga belum mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah inklusi yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan Pemerintah dianggap kurang bisa mensosialisasikan kebijaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan sekolah inklusi atau kebijakan tentang sekolah inklusi sendiri belum jelas dan kurangnya pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Guru menganggap bahwa perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sekolah inklusi kurang baik dari segi kesejahteraan SDM maupun terkait kompetensi SDM.

Menurut Sunaryo (2007) bahwa untuk keberhasilan sekolah inklusi perlu melibatkan banyak pihak. Bines (dalam Carrington dan Robinson, 2004) mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah suatu proses yang melibatkan semua staf sekolah dan siswa untuk perkembangan sekolah seperti bagaimana pendekatan mengorganisasi siswa, peran staf pengajar, pendekatan dalam mengajarkan kurikulum. Begitu juga seperti yang dikemukakan oleh Giangreco (2013) sekolah harus bekerjasama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru. Kepala sekolah dan guru perlu mengikuti kegiatan diklat dalam penanganan ABK, pelatihan khusus dan sejenisnya. Dan juga saling berbagi pengalaman dengan guru lain baik dalam penanganan ABK, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi. Dengan harapan yaitu kedepan peneliti lain maupun pemerintah dapat lebih berfokus pada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan guru, seperti peningkatan pemahaman serta kompetensi guru karena guru adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini juga dikemukakan oleh Hatam dalam (Muhsam, 2020) bahwa guru adalah aktor yang penting dalam proses reformasi sekolah. Harapannya jika guru sudah memahami dan mampu melaksanakan pendidikan inklusi di sekolahnya, guru dapat menyalurkan pengetahuannya ke masyarakat melalui orangtua wali murid baik orangtua dari ABK maupun orangtua dari Non ABK.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pengembangan profesional peningkatan kompetensi guru walaupun terkadang sistem tanggung jawab itu sebagian diserahkan kepada organisasi sekolah, karena sekolah memiliki peran untuk melakukan perubahan, terutama kepala sekolah (Carrington dan Robinson, 2004), tetapi tidak hanya berfokus kepada guru ataupun karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah saja tetapi juga perlu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap adanya sekolah inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sekolah juga dapat mengembangkan kualitas sekolah melalui guru dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sekolah memiliki kewajiban dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Pelaksanaan program inklusi evaluasi dan monitoring secara seksama dan berkelanjutan dari dinas. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan agar mengetahui apakah Program yang sudah direncanakan sudah sesuai tujuan. Selanjutnya dinas pendidikan dapat membuat kebijakan perbaikan atau keputusan lebih lanjut. Lalu permasalahan bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus bagi pemerhati dan Aktivistik Hak Asasi Manusia yang harus segera dituntaskan oleh negara. Hal ini karena seringnya penyandang disabilitas Hendaknya kita juga harus terus berupaya agar hak-hak semua orang dapat terpenuhi dengan layak tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas sebagai seseorang yang peduli dan memperhatikan hak asasi manusia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan program yang terstruktur mengikuti kelebihan dan kemampuan yang dimiliki anak serta menjunjung tinggi toleransi. Akan tetapi, penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dari definisi tersebut masih terbilang kurang karena beberapa faktor. Dimulai dari faktor pendidikannya, kurikulumnya, fasilitasnya, hingga anak berkebutuhan khususnya yang masih sulit menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Rendahnya mentalitas pendidikan inklusi karena orangtua ragu dan menganggap sekolah tersebut berisi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Maka perlu dibutuhkan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia, misalnya memperbanyak guru pembimbing khusus yang berasal dari lulusan PLB, menunjang sarana prasarana demi keberlangsungan proses pembelajaran, dan

pemerintah Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusi untuk memfasilitasi dan memberikan hak kepada anak-anak berkebutuhan yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, Keberhasilan sekolah inklusi perlu melibatkan banyak pihak, diantaranya: komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administratif sekolah, komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru, dan pemerintah bisa berfokus pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan guru, seperti peningkatan pemahaman dan kompetensi guru karena guru adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldin Dwika Setiawan, R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SMA Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). *Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas* , 337-351.
- Asiyah, D. (2018). Dampak Pola Pembelajaran Sekolah Inklusi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Prophetic* , 69-82.
- Kadir, A. (2015). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* , 3-22.
- Muhsam, J., Hasyida, S., & Aiman, U. (2021). Implementation of Contextual Teaching and Learning and Authentic Assessments to the Science (IPA) Learning Outcomes of 4th Grade Students of Primary Schools (SD) in Kota Kupang. 5(3), 11.
- Permatasari, D. R. (2016). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. 176-186.
- Wardah, E. Y. (2019). Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang . *Jurnal Pendidikan Inklusi* , 093-108.
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan* , 109-120.